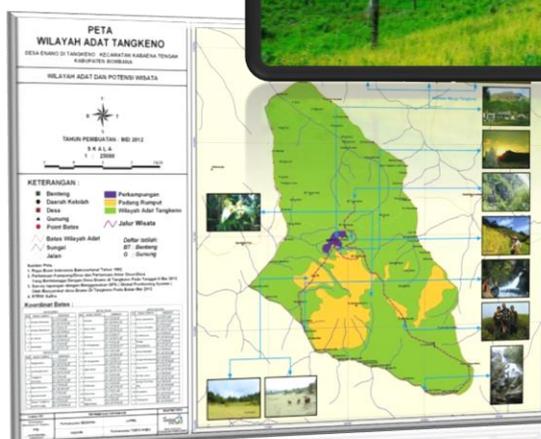




# RENJA PERUBAHAN 2022

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOMBANA



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

2022

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana telah berhasil menyusun Renja Perubahan Tahun 2022.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk menyusun perencanaan dan perencanaan perubahan anggaran selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam perencanaan pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa RENJA ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak dan atasnya kami ucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya Tahun 2022, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan semua pihak yang terkait.

Akhirul Kalam, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Bombana



**Anisa Sri Prihatin, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720414 199201 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	26
3.3 Program dan Kegiatan .....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V PENUTUP	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis



ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bombana. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam



rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sebagai OPD yang menangani urusan wajib Pelayanan Dasar Pemuda dan Olahraga dan urusan pilihan pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD ) yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.* kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2022.

Rencana Kerja di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kabupaten Bombana merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Bombana

### **1.1. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - j. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;



- k. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- p. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja



Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program– program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;
  2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
- 1.3. Sistematika Penyusunan Rencana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Surat Edaran Bupati Bombana Nomor : 050/408/Bappeda Tahun 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022.*

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah, dan:



6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Adapun tabel T-C.29 dapat dilihat pada halaman berikutnya.



## **2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan Olahraga digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten mempunyai ***tugas melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Olahraga dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut:***

1. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
3. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
4. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota:



6. RIPPDA kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan system informasi pariwisata.
8. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
11. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.
12. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.
13. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.
14. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.
15. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
16. Pelaksanaan kerjasama regional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
17. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
18. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
19. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota.



20. Peserta/penyelenggara pameran/*event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
21. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.
22. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
23. Pelaksanaan *event* promosi di dalam negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.
24. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif skala kabupaten/kota.
25. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga skala kabupaten/kota.
26. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga skala kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana di atas maka Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yaitu:

1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan
3. Jumlah PAD Sektor Pariwisata;
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan
5. Jumlah Gelanggang Pemuda
6. Jumlah Organisasi Pemuda
7. Jumlah Pemuda berprestasi
8. Jumlah Olahraga berprestasi



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata,**  
**Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan			67.142	73.856	81.242	89.366	63.131	73.802	81.242	89.366	
2	Rata-rata lama tinggal			2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	
3	Jumlah Penerimaan PAD Sektor Pariwisata			15 Jt	15 Jt	156 Jt	156 jt	15 jt	6,87 jt	156 jt	156 jt	
4	Presentase peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan			0,9 %	1,44 %	1,47 %	1,60%	0,9%	1,42%	1,47%	1,60%	
5	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional			41 medali	41 medali	41 medali	41 medali	41 medali	41 medali	41 medali	41 medali	
6	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata oleh Inspektorat			CC	B	B	B	CC	B	B	BB	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat daerah

#### 1) Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

Salah satu modal utama pengembangan Kepariwisataaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.



Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kepemudaan dan olahraga harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kepemudaan dan olahraga. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha budaya dan pariwisata terus meningkat.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), peran sosial (*social role*), citra diri (*self-image*), perilaku (*behave*), dan motivasi (*motive*) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (*knowledge*) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata.

## **2) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) Yang Belum Sinergis**

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kepemudaan dan olahraga dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan *stakeholders* dalam dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah; swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.



Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga. Sehingga kondisi keterpaduaan antar pihak dalam pembangunan kepariwisataan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat-daerah serta lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif serta kepemudaan dan olahraga yang perlu lebih diberdayakan.

### **3) Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Upaya untuk membangun kepariwisataan daerah pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan sektor pariwisata daerah akan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang devisa terbesar di tingkat nasional. Namun di sisi lain pemerintah pusat dalam komitmennya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Di lain pihak pemda, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, tidak memiliki kiat untuk menyusun Daftar Isian Kegiatan/ Daftar Isian Program yang secara substansial dapat diterima oleh pemerintah pusat.

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana. Salah satu konsekuensi menjadi daerah



otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bombana menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhannya. Sedangkan promosi-pemasaran sektor pariwisata belum menjadi prioritas untuk mendapat anggaran yang cukup. Sehingga perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Bombana cenderung setengah-setengah dan tidak mampu bergerak cepat.

#### **4) Terbatasnya Investasi di Bidang Pariwisata**

Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pariwisata daerah pada masa-masa mendatang adalah, terciptanya industri pariwisata yang handal baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu industri pariwisata Kabupaten Bombana membutuhkan keterlibatan berbagai sektor usaha yang akan membentuk industri tersebut. Dalam hal ini peran swasta (baik daerah, nasional maupun multinasional) akan menjadi sangat besar dan menentukan kuat lemahnya industri pariwisata Kabupaten Bombana

Salah satu indikasi ketertarikan swasta dalam suatu industri ditunjukkan pada tingkat investasi yang ditanamkan. Dalam hal ini kegiatan investasi bidang pariwisata di Kabupaten Bombana sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal.

#### **5) Kurangnya Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Bombana**

Kurangnya minat dan motivasi berkunjung wisatawan (baik mancanegara maupun nusantara) ke daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Bombana salah satunya disebabkan karena kurang adanya tawaran produk wisata baru. Produk-produk yang ada sekarang lebih merupakan polesan dari produk-produk lama dengan kemasan baru.

Ditambah lagi dengan belum adanya Biro Perjalanan yang professional di Bidang Pariwisata di Kabupaten Bombana.

Indikator kejenuhan tersebut diantaranya terlihat dari stagnannya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya motivasi wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang (*revisit*), pendeknya lama



tinggal, dan rendahnya pembelanjaan wisatawan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada pudarnya industri pariwisata Kabupaten Bombana secara keseluruhan.

## B. ISU EKSTERNAL

### 1) *Globalisasi*

Globalisasi telah menjadi isu yang sangat aktual bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia karena konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dihadapi baik dalam membangun kapasitas bangsa yang bersangkutan maupun dalam konteks hubungan antar bangsa yang tidak mungkin dihindari. Dalam era ini arus lalu lintas ekonomi, modal, teknologi, manajemen serta budaya mengalir dengan deras dan leluasa tanpa mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Dampak dari hal tersebut disatu sisi menciptakan peluang, namun di sisi lain menciptakan berbagai kendala.

Salah satu konsekuensi logis dari globalisasi adalah liberalisasi dan aliansi perdagangan jasa-jasa tertuang dalam Persetujuan Umum Tarif Jasa (GATS) diimplementasikan dengan diberlakukannya AFTA/AFAS untuk menghilangkan beberapa hambatan dalam hal perdagangan, meliputi: transaksi perdagangan barang dan jasa, sumber daya modal/investasi, dan pergerakan manusia. Dengan diberlakukannya AFTA/AFAS, “batas-batas negara” yang selama ini menghambat pergerakan perdagangan baik barang dan jasa termasuk di dalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu “dunia tanpa batas”. Akibat konsekuensi logis tersebut maka persaingan/kompetisi antar bangsa adalah faktor kunci yang menuntut setiap negara untuk menyiapkan strategi-strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi era perdagangan bebas, misalnya di bidang pariwisata peningkatan kualitas dan pelayanan produk pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) telah menjadi isu sentral secara global, dan telah menyatu dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat apresiasi dan jaminan suatu bangsa dan negara terhadap HAM secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi eksistensi persahabatan dan kerjasama negara tersebut dengan dunia internasional. Aspek HAM sebagai kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan pembangunan yang berwawasan budaya, diupayakan untuk dijadikan sebagai faktor pendorong dengan ditempatkan dalam skala prioritas di setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia, maka kepedulian dan jaminan terhadap HAM tetap diutamakan.

Di sisi lain, masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan masalah peperangan maupun ancaman dan aksi-aksi terorisme global yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman yang serius pada saat ini.

Akibat peperangan serta aksi-aksi terorisme berupa pengeboman ditempat umum, maupun tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak telah mendudukkan harkat dan martabat manusia pada tataran yang paling rendah. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di destinasi maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya impresi bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan. Untuk itu perlu dicarikan pemecahan keamanan yang bersifat global, karena masalah keamanan telah menjadi bagian dari globalisasi.



Abad ke-21 yang identik dengan era globalisasi juga ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), telah menimbulkan perkembangan yang sangat pesat di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antarnegara maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak-kontak antarbudaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.

## **2) Koordinasi Antar Lembaga**

Pembangunan di bidang pariwisata serta kepemudaan dan olahraga dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan *stakeholders* dalam dapat dijabarkan sebagai berikut : *pemerintah; swasta; dan masyarakat.*

Gambaran pelaku dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan.



Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan kepariwisataan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang pariwisata, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kepariwisataan. Sehingga kondisi keterpaduan antar pihak dalam pembangunan kepariwisataan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat-daerah serta lembaga-lembaga yang berada di berbagai negara perlu lebih diberdayakan.

### **3) Sumber Daya Manusia Berkualitas**

Salah satu modal utama pengembangan pariwisata adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kepariwisataan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang kepariwisataan, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha budaya dan pariwisata terus meningkat. Negara-negara saingan terdekat telah terlibat aktif di dalam diskusi tingkat internasional, sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan sumber daya manusianya dan sekaligus mengantisipasi persaingan setelah dilaksanakannya pasar bebas.



Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), peran sosial (*social role*), citra diri (*self- image*), perilaku (*behave*), dan motivasi (*motive*) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (*knowledge*) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata.

#### **4) *Sistem Informasi Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga***

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan data-data yang valid dan akurat.

Keberadaan database kebudayaan dan database pariwisata sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah, dengan tingkat pembaruan data (*up-date*) yang lambat. Sehingga beberapa rencana dan program-program yang disusun, baik oleh pemerintah maupun swasta kurang dapat mengantisipasi kondisi terkini, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang dicapai.

#### **5) *Peraturan Perundang-Undangan***

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Bombana**



**Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Bombana**

**Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kebijakan			Ket.
	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5
1	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	
2	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	
3	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	
4	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	



5	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan	
6	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha Pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha Pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha Pariwisata agar tercipta iklim usaha	

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### a. Tujuan

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya kepariwisataan serta kepemudaan dan olahraga yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan fungsi dinas dalam teknis pelayanan sebagai pelayan publik agar terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayananan pariwisata yang berbasis budaya serta pelestarian nilai-nilai budaya.
4. Terwujudnya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang berbasis budaya.
5. Terwujudnya Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata dan Budaya yang efektif dan terpadu.
6. Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Daya Tarik Wisata yang berkelanjutan berbasis budaya.
7. Terciptanya kualitas pembangunan dan manajemen pariwisata yang berwawasan lingkungan melalui pola kemitraan.
8. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan



9. Menilai Pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Indikator dan Sasaran Kinerja yang ditetapkan.
10. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencana

**b. Sasaran**

1. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya serta lingkungan pariwisata
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis domestik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program Sapta Pesona yang termuat dalam 7 (tujuh) Daya Tarik Wisata.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga.
7. Lestarinya dan berkembangnya nilai-nilai kebudayaan daerah dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri dalam mengembangkan kepariwisataan daerah.
8. Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan nilai-nilai budaya dan Sapta Pesona.
9. Tersedianya Areal/Kawasan Pariwisata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Bertambahnya kuantitas dan kualitas usaha jasa dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kepemudaan dan olahraga dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan.
11. Telaksananya sistem kadernisasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur serta mekanisme perjenjangan karir secara obyektif, prosedural dan prestatif.



12. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan dinas untuk daerah pada semua bidang dan jenis usaha dalam sektor pariwisata dan olahraga.

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
  - 1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
  - 2) Pencapaian SDGs;
  - 3) Pengentasan kemiskinan
  - 4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- b. Jumlah program yang direncanakan pada tahun 2022 adalah 11 (sebelas program) dengan jumlah kegiatan sebanyak 50 (50) kegiatan.  
Ada 3 (tiga) program wajib yang fokus pada peningkatan PDRB sektor pariwisata yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan program pengembangan ekonomi kreatif. Dimana program dimaksud berfokus di 2 (dua) destinasi unggulan yaitu destinasi yang ada di pulau Kabaena dengan Desa Wisata Tangkeno sebagai pusatnya dan Poleang Barat dengan Danau Ponu-ponu dan Pulau Kondo di Desa Ranokomea menjadi pusatnya.
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2022 Kabupaten Bombana :



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan matriks Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022. Dengan harapan Rencana Kerja yang disusun dapat di akomodir dalam RAPBD tahun 2022. Untuk kerangka pendanaan dapat dilihat dihalaman berikut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan baik rencana kegiatan maupun realisasi pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana pada tahun 2021 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (*target*) yang telah ditetapkan, baik pada indikator *Input, Output, Outcome, Benefit* maupun *Impact*. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Renja Perubahan 2022 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana, yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan. Maka secara umum Tingkat Pencapaian Kinerja (Nilai Capaian Akhir), baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan Tujuan Kinerja, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana mencapai Kualifikasi Baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Kendala yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya juga masalah dukungan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Pada tahun anggaran 2021 dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bombana untuk biaya operasional Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana cukup kecil dibanding dengan beban tugas yang semakin berat.

Namun demikian dengan besarnya dana yang ada serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana telah berupaya seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Rencana Tindak Lanjut**

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana pada tahun 2022, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM baik Aparatur Sipil maupun Kelompok Sadar Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata yang berada di destinasi prioritas pengembangan melalui berbagai pelatihan sehingga terbentuk aparatur kepariwisataan yang tangguh, handal dan profesional.
- b. Sedangkan untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran, maka untuk tahun 2022 ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bombana.

- c. Mengintensifkan Koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Destinasi dengan OPD terkait seperti Bappeda, Dinas PUPR, DLH, Distan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disperindagkop dan OPD terkait lainnya yang menunjang Pengembangan Kepariwisataaan daerah.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang.

Ransia, 2022  
Kepala Dinas  
  
**ANISA SRI PRIHATIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720414 199201 2 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAAN ANGGARAN TAHUN 2022  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022										KET	
					SEBELUM					SESUDAH						SUMBER DANA
					TARGET CAPAIAN KINERJA	HARGA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	HARGA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					
6	7	8	9					10	11							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Bombana				3,946,230,000				4,892,200,000	DBH PUSAT			
			<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>				81,700,000				255,750,000					
			<b>- Belanja Barang Pakai Habis</b>				5,200,000				5,450,000					
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Pkt	1,800,000	1,800,000	1	Pkt	1,800,000	1,800,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Pkt	2,400,000	2,400,000	1	Pkt	2,400,000	2,400,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Pkt	1,000,000	1,000,000	1	Pkt	1,250,000	1,250,000				
			<b>- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>				4,500,000				6,300,000					
			- Makanan Dos		100	Dos	30,000	3,000,000	140	Dos	30,000	4,200,000				
			- Snack		100	Org	15,000	1,500,000	140	Org	15,000	2,100,000				
			<b>- Belanja Perjalanan Dinas</b>				72,000,000				244,000,000					
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	48,000,000	48,000,000	1	Thn	220,000,000	220,000,000				
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	24,000,000	24,000,000				
			<b>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>				20,460,000				27,050,000	DBH PUSAT				
			<b>- Belanja Barang Pakai Habis</b>				2,760,000				3,000,000					
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat		1	Thn	360,000	360,000	1	Thn	600,000	600,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Thn	1,800,000	1,800,000	1	Thn	1,800,000	1,800,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	600,000	600,000				
			<b>- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>				2,700,000				4,050,000					
			- Makanan Dos		60	Dos	30,000	1,800,000	90	Dos	30,000	2,700,000				
			- Snack		60	Org	15,000	900,000	90	Org	15,000	1,350,000				
			<b>- Belanja Perjalanan Dinas</b>				15,000,000				20,000,000					
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	15,000,000	15,000,000	1	Thn	20,000,000	20,000,000				
							-				-					
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Wispora			2,508,790,000				2,644,220,000	DAU				
			<b>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>				2,400,000,000				2,500,000,000	DAU				
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	Thn	2,400,000,000	2,400,000,000	1	Thn	2,500,000,000	2,500,000,000				
			<b>- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>				96,390,000				124,920,000	DAU				
			- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		1	Thn	96,390,000	96,390,000	1	Thn	124,920,000	124,920,000				
			<b>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>				5,300,000				9,800,000	DAU				
			<b>- Belanja Barang Pakai Habis</b>				5,300,000				9,800,000					
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	900,000	900,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	2,400,000	2,400,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Thn	500,000	500,000	1	Thn	500,000	500,000				
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		1	Thn	3,600,000	3,600,000	1	Thn	6,000,000	6,000,000				

		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7,100,000				9,500,000	DAU	
		- Belanja Barang Pakai Habis				7,100,000				9,500,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	1,200,000	1,200,000	1	Thn	1,800,000	1,800,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	2,400,000	2,400,000	1	Thn	2,700,000	2,700,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	500,000	500,000	1	Thn	500,000	500,000		
		- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	Thn	3,000,000	3,000,000	1	Thn	4,500,000	4,500,000		
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9,400,000				9,400,000		
		- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9,400,000				9,400,000	DBH	
		- Honorarium Penatausahaan BMD	1	Thn	9,400,000	9,400,000	1	Thn	9,400,000	9,400,000		
	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				93,600,000				93,600,000		
		- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				47,050,000				47,050,000	PAD	
		- Belanja Barang Pakai Habis				47,050,000				47,050,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	600,000	600,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	1,200,000	1,200,000	1	Thn	1,200,000	1,200,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	250,000	250,000	1	Thn	250,000	250,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Thn	45,000,000	45,000,000	1	Thn	45,000,000	45,000,000		
		- Pengolahan Data Retribusi Daerah				46,550,000				46,550,000	PAD	
		- Belanja Barang Pakai Habis				46,550,000				46,550,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	600,000	600,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	1,200,000	1,200,000	1	Thn	1,200,000	1,200,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	250,000	250,000	1	Thn	250,000	250,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Thn	44,500,000	44,500,000	1	Thn	44,500,000	44,500,000		
	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40,000,000				158,200,000		
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				20,000,000				158,200,000		
		- Pakaian Batik Daerah	40	Stel	500,000	20,000,000	40	Stel	500,000	20,000,000		
		- Pakaian Adat Daerah	-	Stel	-	-	100	Stel	1,200,000	120,000,000		
		- Pakaian Olahraga	-	Stel	-	-	52	Stel	350,000	18,200,000		
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang				20,000,000				-		
		- Bimbingan Teknis	2	Org	10,000,000	20,000,000	-	Org	10,000,000	-		
	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				652,580,000				1,099,830,000		
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,800,000				2,700,000		
		Belanja Barang Pakai Habis				1,800,000				2,700,000		
		- Komponen Listrik	1	Thn	1,800,000	1,800,000	1	Thn	2,700,000	2,700,000		
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17,600,000				22,100,000	DBH PUSAT	
		- Belanja Barang Pakai Habis				17,600,000				22,100,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	1	Thn	9,000,000	9,000,000	1	Thn	12,000,000	12,000,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	6,000,000	6,000,000	1	Thn	7,500,000	7,500,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1	Thn	500,000	500,000	1	Thn	500,000	500,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	2,100,000	2,100,000	1	Thn	2,100,000	2,100,000		
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6,000,000				9,100,000	DBH PUSAT	
		- Belanja Barang Pakai Habis				6,000,000				9,100,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	-	-	1	Thn	1,600,000	1,600,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	6,000,000	6,000,000	1	Thn	7,500,000	7,500,000		
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12,000,000				12,000,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa				12,000,000				12,000,000		

		- Surat Kabar		60	exmplr	200,000	12,000,000	60	exmplr	200,000	12,000,000		
		- Fasilitas Kunjungan Tamu					12,000,000				12,000,000	DBH PUSAT	
		- Belanja Barang Pakai Habis					12,000,000				12,000,000		
		- Makan Minum Tamu		12	bulan	1,000,000	12,000,000	12	bulan	1,000,000	12,000,000		
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					562,500,000				965,300,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa					562,500,000				965,300,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas					522,000,000				900,000,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	350,000,000	350,000,000	1	Thn	700,000,000	700,000,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Thn	172,000,000	172,000,000	1	Thn	200,000,000	200,000,000		
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1	Pkt	-	-	1	Pkt	20,000,000	20,000,000		
		- Makan Minum Rapat Umum		45	OT	300,000	13,500,000	51	OT	300,000	15,300,000		
		- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		1	Thn	27,000,000	27,000,000	1	Thn	30,000,000	30,000,000		
		- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					22,450,000				22,450,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa					22,450,000				22,450,000		
		- Honorarium Tenaga Arsiparis		1	Thn	21,000,000	21,000,000	1	Thn	21,000,000	21,000,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	600,000	600,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Thn	600,000	600,000	1	Thn	600,000	600,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Thn	250,000	250,000	1	Thn	250,000	250,000		
		- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					40,680,000				54,180,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa					40,680,000				54,180,000		
		- Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi dan Website		1	Thn	40,500,000	40,500,000	1	Thn	54,000,000	54,000,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Thn	180,000	180,000	1	Thn	180,000	180,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					174,800,000				180,800,000		
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					69,800,000				75,800,000	DAU	
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin					69,800,000				75,800,000		
		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		1	Unit	22,000,000	22,000,000	1	Unit	22,000,000	22,000,000		
		- Belanja Modal Alat Pendingin		0	Unit	-	-	1	Unit	6,000,000	6,000,000		
		- Belanja Modal Personal Computer		1	Pkt	45,000,000	45,000,000	1	Pkt	45,000,000	45,000,000		
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer		1	Pkt	2,800,000	2,800,000	1	Pkt	2,800,000	2,800,000		
		- Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					105,000,000				105,000,000	DAU	
		- Belanja Modal Gedung dan Bangunan					105,000,000				105,000,000		
		- Pembangunan Pagar Kantor		1	Pkt	100,000,000	100,000,000	1	Pkt	100,000,000	100,000,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		1	Pkt	5,000,000	5,000,000	1	Pkt	5,000,000	5,000,000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					79,800,000				94,550,000		
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					57,000,000				47,750,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa					57,000,000				47,750,000		
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					57,000,000				47,750,000		
		- Belanja Tagihan Telepon		1	Thn	10,200,000	10,200,000	1	Thn	850,000	850,000		
		- Belanja Tagihan Air		1	Thn	2,400,000	2,400,000	1	Thn	7,200,000	7,200,000		
		- Belanja Tagihan Listrik		1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	24,000,000	24,000,000		
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1	Thn	20,400,000	20,400,000	1	Thn	15,700,000	15,700,000		
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					22,800,000				46,800,000	DAU	
		- Belanja Barang dan Jasa					22,800,000				46,800,000		
		- Belanja Jasa Tenaga Supir		12	Bln	1,000,000	12,000,000	12	Bln	1,000,000	12,000,000		
		- Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1	Thn	10,800,000	10,800,000	1	Thn	10,800,000	10,800,000		
		- Honorarium Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kreatif		0	Bln	-	-	4	Bln	6,000,000	24,000,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-					285,100,000				328,800,000		

		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55,000,000				71,000,000		
		- Belanja Barang dan Jasa					55,000,000				71,000,000		
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak					55,000,000				71,000,000		
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1	Thn	25,000,000	25,000,000	1	Thn	35,000,000	35,000,000			
		- Belanja Jasa Service	1	Thn	6,000,000	6,000,000	1	Thn	6,000,000	6,000,000			
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	30,000,000	30,000,000			
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12,500,000				21,000,000	DBH	
		- Belanja Barang dan Jasa					12,500,000				21,000,000		
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1	Thn	4,000,000	4,000,000	1	Thn	6,000,000	6,000,000			
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1	Thn	7,800,000	7,800,000	1	Thn	10,800,000	10,800,000			
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1	Thn	700,000	700,000	1	Thn	4,200,000	4,200,000			
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					217,600,000				236,800,000	DBH	
		- Belanja Barang dan Jasa					82,900,000				102,100,000		
		- Gedung Kantor	1	Thn	48,000,000	48,000,000	1	Thn	56,000,000	60,000,000			
		- Halaman Gedung Kantor	1	Thn	2,500,000	2,500,000	1	Thn	2,500,000	2,500,000			
		- Petugas Kebersihan Kantor/Cleaning Service	1	Thn	32,400,000	32,400,000	1	Thn	32,400,000	39,600,000			
		- Belanja Pemeliharaan					134,700,000				134,700,000		
		- Pemeliharaan Gedung Dekranas (Luncuran 2021)	1	Pkt	134,700,000	134,700,000	1	Pkt	134,700,000	134,700,000			
	PROGRAM WAJIB TAHUNAN						4,332,740,000				8,457,100,000		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						433,680,000				490,880,000		
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader					393,920,000				393,920,000		
		- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Ben					386,420,000				386,420,000		
		- Belanja Barang dan Jasa					310,620,000				310,620,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Pkt	2,800,000	2,800,000	1	Pkt	2,800,000	2,800,000			
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Pkt	120,000	120,000	1	Pkt	120,000	120,000			
		- Pakaian dan Perlengkapan Paskibra	1	Pkt	5,000,000	5,000,000	1	Pkt	5,000,000	5,000,000			
		- Belanja Pakaian Olahraga	90	Stel	350,000	31,500,000	90	Stel	350,000	31,500,000			
		- Belanja Pakaian Paskibraka	76	Stel	1,500,000	114,000,000	76	Stel	1,500,000	114,000,000			
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Pkt	150,000,000	150,000,000	1	Pkt	150,000,000	150,000,000			
		- Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral)	1	Pkt	7,200,000	7,200,000	1	Pkt	7,200,000	7,200,000			
		- Belanja Jasa Kantor					53,300,000				53,300,000		
		- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1	Org	500,000	500,000	1	Org	500,000	500,000			
		- Honorarium Pelatih dan Peserta Paskibraka	1	Pkt	46,800,000	46,800,000	1	Pkt	46,800,000	46,800,000			
		- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					-						
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1	Pkt	6,000,000	6,000,000	1	Pkt	6,000,000	6,000,000			
		- Belanja Barang dan Jasa					22,500,000				22,500,000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					-						
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Keg	15,000,000	15,000,000	1	Keg	15,000,000	15,000,000			
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Keg	7,500,000	7,500,000	1	Keg	7,500,000	7,500,000			
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat					39,760,000				96,960,000		
		- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					39,760,000				96,960,000		
		- Belanja Barang dan Jasa					39,760,000				96,960,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Keg	120,000	120,000	1	Keg	750,000	750,000			

			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Keg	240,000	240,000	1	Keg	360,000	360,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Keg	750,000	750,000	1	Keg	1,200,000	1,200,000		
			- Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral)		1	Keg	150,000	150,000	1	Keg	150,000	150,000		
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	Keg	4,500,000	4,500,000	1	Keg	4,500,000	4,500,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	50,000,000	50,000,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Thn	10,000,000	10,000,000	1	Thn	40,000,000	40,000,000		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>							<b>2,823,680,000</b>				<b>5,075,070,000</b>		
		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>216,180,000</b>				<b>278,300,000</b>		
			<b>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar</b>					<b>216,180,000</b>				<b>278,300,000</b>		
			<b>- Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>64,180,000</b>				<b>103,300,000</b>		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor		1	Keg	120,000	120,000	1	Keg	300,000	300,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	Keg	60,000	60,000	1	Keg	500,000	500,000		
			- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat											
			- Peralatan Olahraga		1	Pkt	40,000,000	40,000,000	1	Pkt	40,000,000	40,000,000		
			- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	24,000,000	24,000,000		
			<b>- Belanja Jasa Kantor</b>					<b>22,000,000</b>				<b>22,000,000</b>		
			- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1	Thn	16,500,000	16,500,000	1	Thn	16,500,000	16,500,000		
			- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		11	OB	500,000	5,500,000	11	OB	500,000	5,500,000		
			<b>- Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>42,000,000</b>				<b>42,000,000</b>		
			- Honorarium Pelatih Sepakbola		12	Bln	3,500,000	42,000,000	12	Bln	3,500,000	42,000,000		
			<b>- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>					<b>3,000,000</b>				<b>3,000,000</b>		
			- Sewa Sound Sistem		3	Hari	1,000,000	3,000,000	3	Hari	1,000,000	3,000,000		
			<b>- Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>70,000,000</b>				<b>93,000,000</b>		
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	55,000,000	55,000,000	1	Thn	78,000,000	78,000,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Thn	-	-	1	Thn	7,000,000	7,000,000		
			<b>- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>		<b>1</b>	<b>Pkt</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1</b>	<b>Pkt</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>		
		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>						<b>2,607,500,000</b>				<b>4,796,770,000</b>		
		<b>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</b>						<b>2,600,000,000</b>				<b>4,224,000,000</b>		
			<b>- Belanja Hibah</b>					<b>2,600,000,000</b>				<b>4,200,000,000</b>		
			- Hibah KONI Bombana		1	Thn	2,600,000,000	2,600,000,000	1	Thn		4,200,000,000		
			<b>- Belanja Perjalanan Dinas</b>									<b>24,000,000</b>		
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Keg	-	-	1	Keg	24,000,000	24,000,000		
		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>216,670,000</b>				<b>365,270,000</b>		
			<b>- Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1,670,000</b>				<b>2,070,000</b>		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor		1	Keg	1,600,000	1,600,000	1	Keg	2,000,000	2,000,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	Keg	70,000	70,000	1	Keg	70,000	70,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga											
			<b>- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat</b>					<b>82,000,000</b>				<b>107,200,000</b>		
			- Peralatan Olahraga		1	Pkt	40,000,000	40,000,000	1	Pkt	40,000,000	40,000,000		
			- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1	Pkt	42,000,000	42,000,000	1	Pkt	60,300,000	62,000,000		
			- Belanja Pakaian Olahraga		1	Set	-	-	1	Pkt	5,200,000	5,200,000		
			<b>- Belanja Jasa Kantor</b>					<b>53,000,000</b>				<b>72,000,000</b>		
			- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1	Pkt	32,000,000	32,000,000	1	Pkt	42,000,000	42,000,000		
			- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1	Pkt	15,000,000	15,000,000	1	Pkt	24,000,000	24,000,000		
			- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		1	Pkt	6,000,000	6,000,000	1	Pkt	6,000,000	6,000,000		
			<b>- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>		<b>1</b>	<b>Pkt</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>1</b>	<b>Pkt</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>		

			- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya								3,000,000		
			- Belanja Modal Jaring Gawang	0	Set	-	-	2	Set	1,500,000	3,000,000		
			- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga								1,000,000		
			- Belanja Trophy/Piala	1	Pkt	-	-	1	Pkt	1,000,000	1,000,000		
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>				7,500,000				207,500,000		
			- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan				7,500,000				7,500,000		
			- Pemeliharaan Lapangan Futsal	1	Thn	7,500,000	7,500,000	1	Thn	7,500,000	7,500,000		
			- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga				-				200,000,000		
			- Peningkatan Lapangan Futsal	0	Pkt	-	-	1	Pkt	200,000,000	200,000,000		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN						150,000,000				150,000,000		
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>				150,000,000				150,000,000		
			- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				150,000,000				150,000,000		
			- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				150,000,000				150,000,000		
			- Belanja Hibah Pramuka	1	Organisasi	150,000,000	150,000,000	1	Organisasi	150,000,000	150,000,000		
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						300,500,000				380,500,000		
			<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				247,600,000				327,600,000		
			- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				150,000,000				150,000,000		
			- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				150,000,000				150,000,000		
			- Pengadaan Papan Nama Wisata	1	Pkt	150,000,000	150,000,000	1	Pkt	150,000,000	150,000,000		
			- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				97,600,000				177,600,000		
			- Belanja Barang dan Jasa				3,600,000				3,600,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Pkt	900,000	900,000	1	Pkt	900,000	900,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Pkt	1,800,000	1,800,000	1	Pkt	1,800,000	1,800,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Pkt	900,000	900,000	1	Pkt	900,000	900,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas				94,000,000				174,000,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Thn	70,000,000	70,000,000	1	Thn	150,000,000	150,000,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Thn	24,000,000	24,000,000		
							-						
			<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				52,900,000				52,900,000		
			- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				52,900,000				52,900,000		
			- Belanja Barang dan Jasa				4,900,000				4,900,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	2,500,000	2,500,000	1	Thn	2,500,000	2,500,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	900,000	900,000	1	Thn	900,000	900,000		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	1,500,000	1,500,000	1	Thn	1,500,000	1,500,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas				48,000,000				48,000,000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Thn	48,000,000	48,000,000	1	Thn	48,000,000	48,000,000		
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						340,950,000				1,411,700,000		

		Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					340,950,000				1,411,700,000		
		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dalam dan luar daerah				115,950,000				1,086,700,000		
		<b>- Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>65,950,000</b>				<b>386,450,000</b>		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Pkt	1,200,000	1,200,000	1	Pkt	12,000,000	12,000,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	-	-	-	1	Pkt	1,200,000	1,200,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	-	-	-	1	Pkt	250,000	250,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		-	-	-	-	1	Pkt	37,500,000	37,500,000		
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		-	-	-	-	1	Pkt	12,000,000	12,000,000		
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1	Pkt	40,000,000	40,000,000	1	Pkt	160,000,000	160,000,000		
		- Belanja Pakaian Adat Daerah					-						
		- Sewa Pakaian Adat Penari		80	Set	150,000	12,000,000	60	Set	150,000	9,000,000		
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-				-		
		- Honorarium Dewan Juri		-	-	-	-	1	Pkt	7,500,000	7,500,000		
		- Honorarium Pembawa Acara/ MC		1	Pkt	1,250,000	1,250,000	1	Pkt	9,000,000	9,000,000		
		- nstruktur Tari Festival Tangkeno		-	-	-	-	1	Pkt	20,000,000	20,000,000		
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					-				-		
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Festival Tangkeno		1	Pkt	10,000,000	10,000,000	1	Pkt	38,000,000	38,000,000		
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli					-				-		
		Jasa Dekorasi		1	Pkt	1,500,000	1,500,000	1	Pkt	39,000,000	39,000,000		
		- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					-				-		
		- Jasa Lighting Festival Tangkeno		-	-	-	-	1	Pkt	16,000,000	16,000,000		
		- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					-				-		
		- Jasa Pembuatan Video Kegiatan					-	1	Pkt	10,000,000	10,000,000		
		- Jasa Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Online					-	1	Pkt	15,000,000	15,000,000		
		<b>- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>5,000,000</b>				<b>142,750,000</b>		
		- Belanja Sewa Electric Generating Set					-	1	Pkt	40,000,000	40,000,000		
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		1	Keg	2,250,000	-	1	Keg	18,750,000	18,750,000		
		- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					-				-		
		- Belanja Sewa Tenda Samavil					-	1	Pkt	24,000,000	24,000,000		
		- Belanja Sewa Alat Musik		1	Pkt	5,000,000	5,000,000	1	Pkt	60,000,000	60,000,000		
		<b>- Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>45,000,000</b>				<b>545,000,000</b>		
		- Belana Perjalanan Dinas Dalam Biasa					-	1	Thn	450,000,000	450,000,000		
		- Belana Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Keg	45,000,000	45,000,000	1	Keg	95,000,000	95,000,000		
		- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					-	1	Pkt	10,000,000	10,000,000		
		- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					-				-		
		- Trophy					-	1	Pkt	2,500,000	2,500,000		
		<b>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>					<b>25,000,000</b>				<b>25,000,000</b>		
		<b>- Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>25,000,000</b>				<b>25,000,000</b>		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Thn	25,000,000	25,000,000	1	Thn	25,000,000	25,000,000		
		<b>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</b>					<b>200,000,000</b>				<b>300,000,000</b>		
		<b>- Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>200,000,000</b>				<b>300,000,000</b>		
		- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					200,000,000				300,000,000		
		- Pembuatan Video Promosi Pariwisata Daerah		1	Pkt	200,000,000	200,000,000	1	Pkt	200,000,000	200,000,000		
		- Jasa Media Promosi Pariwisata Daerah		0	Pkt		-	1	Pkt	100,000,000	100,000,000		

7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										73,000,000				607,250,000		
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									73,000,000				607,250,000		
		- Pengembangan Riset	Kab. Bombana								49,000,000				49,000,000		
		- Belanja Barang dan Jasa															
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Pkt	2,400,000	2,400,000	1	Pkt	2,400,000	2,400,000				2,400,000		
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Pkt	2,400,000	2,400,000	1	Pkt	2,400,000	2,400,000				2,400,000		
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1	Keg	4,200,000	4,200,000	1	Keg	4,200,000	4,200,000				4,200,000		
		- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin															
		- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		2	Hari	1,000,000	2,000,000	2	Hari	1,000,000	2,000,000				2,000,000		
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		1	Keg	4,000,000	4,000,000	1	Keg	4,000,000	4,000,000				4,000,000		
		- Belana Perjalanan Dinas															
		- Belana Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Keg	24,000,000	24,000,000	1	Keg	24,000,000	24,000,000				24,000,000		
		- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya															
		- Pengadaan Papan Informasi		1	Pkt	10,000,000	10,000,000	1	Pkt	10,000,000	10,000,000				10,000,000		
		- Fasilitas Kekayaan Intelektual									24,000,000				357,350,000		
		- Belanja Barang dan Jasa															
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											1	Pkt	900,000	900,000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											1	Pkt	1,200,000	1,200,000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											1	Pkt	250,000	250,000	
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli											1	Pkt			
		- Jasa Tenaga Disainer											1	Pkt	200,000,000	200,000,000	
		- Belana Perjalanan Dinas											1	Pkt			
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Thn	24,000,000	24,000,000	1	Pkt	155,000,000	155,000,000				155,000,000		
		- Perlindungan Hasil Kreativitas														200,900,000	
		- Belanja Barang dan Jasa															
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya															
		- Bahan Pameran Sultra Tenun Karnaval											1	Pkt	10,000,000	10,000,000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											1	Pkt	900,000	900,000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											1	Pkt	5,400,000	5,400,000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											1	Pkt	1,200,000	1,200,000	
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat											1	Keg	5,400,000	5,400,000	
		- Belanja Pakaian Khas Daerah															
		- Sewa Pakaian Karnaval		1	Pkt	50,000,000		1	Pkt	25,000,000	25,000,000				25,000,000		
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia															
		- Jasa Make Up Sultra Tenun Karnaval											1	Pkt	2,000,000	2,000,000	
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli															
		- Jasa Dekorasi											1	Pkt	1,500,000	1,500,000	
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang															
		- Sewa Kendaraan Sultra Tenun Karnaval											1	Keg	7,500,000	7,500,000	
		- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya															
		- Sewa Boot Sultra Tenun Karnaval											1	Pkt	30,000,000	30,000,000	
		- Belana Perjalanan Dinas															
		- Belana Perjalanan Dinas Biasa											1	Keg	112,000,000	112,000,000	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										210,930,000				341,700,000		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									210,930,000				341,700,000		

